Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 7 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

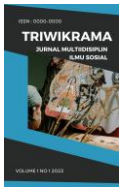

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RESOLUSI KONFLIK KASHMIR: EVALUASI EFEKTIVITAS UNITED NATIONS MILITARY OBSERVER GROUP IN INDIA AND PAKISTAN (UNMOGIP)

Naila Putri Azzahra[1], Prilla Marsingga[2]
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received March 2025
Revised March 2025
Accepted March 2025
Available online March 2025

2310631260042@student.unsika.ac.id[1],
prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id[2]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *The conflict between India and Pakistan over the Kashmir region has persisted since 1947, making it one of the longest-runnnig disputes in the world. To monitor the ceasefire between the two nations, the United Nations (UN) established the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) in 1949. Although UNMOGIP aims to observe violations and provide independent reports, its effectiveness remains a subject of debate. India considers this mission irrelevant since the Simla Agreement of 1972, whereas Pakistan continues to support its presencce. This study evaluates the role of UNMOGIP in mitigating approach through document and literature analysis. The findings indicate that UNMOGIP's effectiveness has declined due to limited mandates, restricted access in Indian territory, and the lack of authority to enforce decisions. Despite its limitations, UNMOGIP remain a symbol of international presencein the Kashmir conflict. Therefore, reforms or new approaches are needed to enchance the UN's effectiveness in maintaining stability in the region.*

Keywords: *Kashmir, India-Pakistan Conflict, UNMOGIP*

PENDAHULUAN

Perlu kita ketahui bahwa di setiap kehidupan manusia selalu diwarnai oleh berbagai bentuk konflik. Konflik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia, seperti sengketa yang terjadi di wilayah Asia Selatan, yaitu Kashmir. Kashmir adalah wilayah yang sering diberi julukan oleh banyak orang sebagai surga, yang dikarenakan memiliki pemandangan indah, di mana sungai mengalir dan tanahnya subur (Rizky, 2016). Karena wilayah ini memiliki daya tarik yang dapat banyak pihak ingin menguasai wilayah tersebut, sampai akhirnya terdapat konflik yang melibatkan dua negara besar, yaitu India dan Pakistan. Perdebatan antara kedua pihak untuk merebut wilayah Kashmir mendapati perhatian internasional karena sengketa yang hingga saat ini belum berakhir (Nugroho, 2017).

Perang antara kedua negara ini merupakan salah satu sengketa terpanjang, pada 1947-1948, antara India dan Pakistan mengklaim atas wilayah Jammu-Kashmir. Sejak India dan Pakistan merdeka pada tahun 1947, wilayah ini menjadi titik panas ketegangan yang memicu tiga perang besar dan banyak bentrokan bersenjata. Untuk mengurangi konflik dan memastikan gencatan senjata berjalan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP) pada tahun 1949. Misi ini bertugas memantau pelanggaran gencatan senjata di perbatasan dan memberikan laporan independen tentang situasi

di lapangan (UN Peacekeeping, 2016). Namun, peran UNMOGIP dalam konflik Kashmir terus diperdebatkan. India, sejak perjanjian Simla tahun 1972, menganggap misi ini sudah tidak relevan dan berpendapat bahwa konflik harus diselesaikan secara bilateral antara India dan Pakistan. Sementara itu, Pakistan masih mengakui keberadaan UNMOGIP dan terus meminta organisasi ini untuk memantau situasi perbatasan. Akibatnya, UMOGIP tidak bisa beroperasi secara maksimal, terutama di wilayah yang dikuasai India, karena aksesnya dibatasi (Schofield, 2003).

Selain itu, UNMOGIP memiliki keterbatasan dalam menjalankan mandatnya. Dengan jumlah personel yang relatif sedikit dan tanpa wewenang untuk menegakkan keputusan, mereka hanya bisa melaporkan kejadian tanpa bisa memberikan sanksi atau tindakan tegas. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai efektivitas UNMOGIP dalam mengurangi konflik, terutama di tengah meningkatnya nasionalisme dsn ketegangan militer di kawasan tersebut. Banyak pihak mempertanyakan apakah ada keberadaan mereka masih relevan dan dapat memainkan peran yang berarti dalam konflik Kashmir? Ataukah apakah diperlukan reformasi dalam cara PBB yang lebih efektif untuk meredam ketegangan di Kashmir (Bose, 2003).

Selama ini, banyak penelitian tentang konflik Kashmir yang condong dan menyoroti diplomasi antara India dan Pakistan atau peran negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok dalam isu ini. Namun, kajian yang secara khusus membahas efektivitas UNMOGIP masih terbatas, terutama terkait dampaknya terhadap stabilitas di perbatasan. Karena itu, penelitian ini ingin mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi sejauh mana UNMOGIP benar-benar berkontribusi dalam mengurangi ketegangan di Kashmir. Dengan memahami lebih dalam peran UNMOGIP, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana organisasi internasional menangani konflik berkepanjangan seperti di Kashmir. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi komunitas internasional dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik.

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti peran PBB dalam konflik Kashmir, khususnya efektivitas UNMOGIP, metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen penting, laporan, dan juga berbagai referensi akademik.Penelitian ini akan mengandalkan analisis dokumen dan studi literatur. Artinya, penulis akan mengumpulkan data dari laporan resmi PBB, kebijakan India dan Pakistam terkait UNGIMOP, serta buku dan jurnal yang membahas konflik ini. Selain itu, berita dari media internasional akan menjadi sumber tambahan untuk melihat perkembangan terbaru dari konflik yang akan penulis kaji. Setelah semua data terkumpul, penulis akan menganalisis secara deskriptif dan mencari tahu apakah UNMOGIP benar-benar berperan dan memiliki kontribusi dalam menjaga perdamaian di Kashmir atau justru hanya jadi pemantau pasif dan perannya hanya formalitas belaka?

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 7 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Konflik India dan Pakistan

Konflik antara India dan Pakistan berakar dari pembagian India Britania pada tahun 1947, yang menghasilkan dua negara merdeka: India dan Pakistan. Salah satu isu paling kontroversial dalam pembagian ini adalah status wilayah Jammu dan Kashmir, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim tetapi diperintah oleh seorang Maharaja Hindu (Khairunnisa, B. W, 2021). Ketika maharaja memilih bergabung dengan India, Pakistan menanggapinya dengan mengirimkan pasukan tidak resmi, yang memicu Perang Indo-Pakistan pertama (1947-1948). Perang ini berakhir dengan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menghasilkan pembagian wilayah tersebut oleh Garis Gencatan Senjata (kemudian dikenal sebagai *Line of Control*/*LoC*) dan pembentukan *United Nations Militaru Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP) untuk mengawasi pelanggaran gencatan senjata (Schofield, 2003).

Meskipun PBB berusaha menengahi konflik ini, ketegangan antara India dan Pakistan terus berlanjut, memicu perang kedua pada tahun 1965 dan perang ketiga pada tahun 1971. Yasir M Hadi dalam (Payapo, 2014) memaparkan jika perang yang terjadi antara India dan Pakistan sebanyak empat kali. Perjanjian Simla pada tahun 1972 menegaskan kembali LoC sebagai batas de facto antara kedua negara, tetapi tidak menyelesaikan sengketa Kashmir secara permanen. India kemudia mengadopsi sikap bahwa UNMOGIP tidak lagi relevan karena Perjanjian Simla mengharuskan India dan Pakistan menyelesaikan sengketa Kashmir melaluui negosiasi bilateral. Sebaliknya, Pakistan tetap mendukung keberlanjutan UNMOGIP sebagai mekanisme pemantauan internasional terhadap tindakan militer India di wilayah tersebut (Monica et el., 2017).

Pada dekade berikutnya, konflik di Kashmir berkembang menjadi gerakan separatis yang melibatkan kelompok-kelompok militan, yang sering kali mendapatkan dukungan dari Pakistan. India menuduh Pakistan mendanai dan melatih militan di Kashmir, sementara Pakistan mengklaim bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi hak penentuan nasib sendiri rakyat Kashmir. Insiden besar seperti Perang Kargil 1999, serangan terhadap parlemen India pada 2001, dan ketegangan pasca-serangan Mumbai 2008 menunjukkan bahwa Kashmir tetap menjadi titik rawan dalam hubungan India-Pakistan (Alam et al., 2016).

Meskipun UMOGIP terus beroperasi, efektivitasnya dipertanyakan karena keterbatasan mandatnya. India membatasi akses UNMOGIP di wilayahnya, membuat pengawasan hanya efektif di sisi Pakistan. Selain itu, kurangnya wewenang untuk menegakkan keputusan dan absennya mekanisme sanksi membuat UNMOGIP lebih berperan sebagai pencatat insiden dibandingkan sebagai aktor resolusi konflik. Dengan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, evaluasi lebiih lanjut terhadap efektivitas UNMOGIP menjadi penting untuk menentukan apakah kehadiran badan ini masih relevan dalam upaya menciptakan perdamaian di Kashmir.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 7 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1.2 Peran dan Mandat UNMOGIP

PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 39 dan No. 47, memutuskan untuk mengirim pengamat militer yang akan memantau apakah ada pelanggaran dalam gencatan senjata kali ini atau tidak yang terjadi di sepanjang *Ceasefire Line* (CFL) yang kemudian disepakati bersama lewat *Karachi Agreement* pada tahun 1949 (Drishti IAS, 2022).

Sebagai pengamat, UNMOGIP sendiri tidak mampu mengambil tindakan, baik dari segi kekuatan militer bahkan wewenang. Tugas yang mereka dapat hanya dapat mencatat, menyelidiki, serta melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada Sekretaris Jenderal PBB. Begitu hasil keluar, laporan ini kemudian diteruskan ke Dewan Keamanan PBB agar masyarakat dan dunia internasionall bisa memahami situasi di lapangan (*UN Peacekeeping, 2016*). Jadi sejak awal, UNMOGIP ini telah beroperasi dengan menempatkan timnya di kedua sisi perbatasan, dengan enam pos pengamatan di wilayah Pakistan dan empat di wilayah India. (*Better World Campaign,* 2023). Tetapi, situasi di lapangan mengalami perubahan yang cukup drastis dan hal ini terjadi setelah Perjanjian Shimla 1972. Konflik India- Pakistan terus berlanjut hingga perang pada berikutnya pada tahun 1965 dan 1971, yang akhirnya memuncak dengan perjanjian tersebut. Salah satu poin utama dalam Perjanjian Shimla adalah bahwa India dan Pakistan sepakat buat menyelesaikan konflik Kashmir secara bilateral, tetapi tanpa adanya intervensi oleh pihak ketiga. Perubahan ini juga yang dapat membawa konsekuensi besar bagi UNMOGIP karena CFL diubah menjadi *Line of Control* (LOC) (Dixit, 2003).

India menganggap bahwa dengan adanya Perjanjian Shimla, mandat dari UNMOGIP telah berakhir atau habis masanya. Mereka bergargumen bahwa sejak pergantian CFL menjadi LoC, pengamat PBB tidak lagi memiliki perannya dalam mengawasi perbatasan. Dan juga sebaliknya, Pakistan masih mendukung UNMOGIP dan masih terus memperbolehkan mereka beroperasi di wilayahnya. Akibat perbedaan sikap ini, UNMOGIP akhirnya hanya bisa beroperasi di sisi Pakistan, karena dari sisi India sendiri terlihat membatasi akses mereka (APP News, 2023). Ini berarti bahwa laporan yang mereka buat menjadi tidak seimbang, karena hanya mencerminkan satu sisi dari konflik yang terjadi. Dari satu sisi, keberadaan UNMOGIP dapat dikatakan penting karena mereka memberikan mekanisme pemantauan yang independen terhadap konflik yang terjadi di perbatasan Kashmir (Schofield, 2003). Walaupun peran UNMOGIP ini hanya bisa mencatat dan melaporkan insiden, tetapi laporan yang mereka ambil tetap digunakan terutama oleh PBB serta komunitas internasional lainnya untuk memahami seberapa baik atau buruknya kondisi keamanan di wilayah tersebut (*UN Peacekeeping, 2023).* Dengan adanya laporan dari UNMOGIP, ketegangan masih tetap dapat untuk dikendalikan, karena kedua belah pihak tahu bahwa ada pihak netral yang memantau pergerakan mereka.

1.3 Evaluasi Efektivitas UNMOGIP

Tetapi di sisi lain, UNMOGIP memiliki banyak keterbatasan yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak terutama dalam meredam konflik secara langsung antarwilayah. Mereka tidak memiliki wewenang sejauh ini untuk mengambil tindakan atau sekadar memberikan

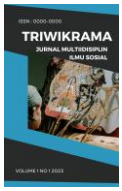

sanksi terhadap pelanggaran gencatan senjata yang mereka temukan. Jadi semua yang mereka lakukan hanya mencatat dan melaporkan, tanpa ada jaminan bahwa informasi tersebut akan memberikan dampak nyata dalam mengurangi kekerasan (Indian Express, 2016).

Selain itu, karena India menolak bekerja sama, efektivitas UNMOGIP semakin dipertanyakan. Pada tahun 2014, India bahkan secara resmi meminta agar misi ini dihentikan saja karena dari sisi India hal ini dianggap tidak relevan lagi. Karena bagi India, konflik di Kashmir adalah urusan internal yang tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Berbeda dengan Pakistan, yang justru ingin melibatkan komunitas internasional untuk memberikan tekanan terhadap India (Schofield, 2003). Maka dari itu sejak tahun 1972, hal ini justru menciptakan ketimpangan informasi, karena mereka tidak bisa melihat langsung apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh india atau tidak, hal inilah yang menjadi tantangan bagi UNMOGIP sendiri (APP News, 2023).

Selain masalah akses, UNMOGIP juga mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Sebagai sebuah misi pengamat, mereka memiliki jumlah personel yang terbatas, sementara wilayah yang harus mereka awasi saja sangat luas dan juga sering kali sulit dijangkau (Drishti IAS, 2022). Di samping tantangan operasional yang didapat, UNMOGIP juga harus menghadapi ketegangan politik yang terus meningkat antara kedua negara tersebut, India-Pakistan. Karena dari dua negara memiliki pandangan yang bertolak belakang mengenai peran UNMOGIP. Selama tidak ada kesepakatan antara kedua negara mengenai peran UNMOGIP, misi ini akan tetap berada dalam posisi yang sulit dan terbatas.

Jadi dalam beberapa dekade terakhir efektivitas UNMOGIP semakin menurun karena India sudah tidak lagi mengakui perannya dan menutup akses dari manapun, sehingga eskalasi konflik di Kashmir terus terjadi meskipun UNMOGIP masih berada di sana. Meski dapat dikatakan terbatas dalam perannya, UNMOGIP masih dianggap sebagai simbol kehadiran internasional dalam konflik Kashmir. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa komunitas internasional tetap mengawasi situasi di wilayah-wilayah konflik, meskipun pengaruhnya tidak sekuat dulu (*UN Peacekeeping, 2016*). Dan kesimpulan yang saya dapat mengenai efektivitas peran UNMOGIP hingga saat ini, sudah sangat berkurang bahkan menurun drastis dibandingkan ketika pertama kali dibentuk. Selama India dan Pakistan tidak mencapai kesepakatan mengenai status UNMOGIP, misi ini akan tetap berada dalam posisi yang ambigu-tetap ada, tetapi dengan pengaruh yang semakin kecil dalam meredakan konflik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti efektivitas UNMOGIP dalam mengawasi konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Meskipun dibentuk sebagai pengawas gencatan senjata, UNMOGIP menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan mandat, akses yang terbatas di wilayah India, serta kurangnya wewenang untuk menegakkan keputusan atau memberikan sanksi. Sikap India yang menganggap UNMOGIP tidak lagi relevan sejak Perjanjian Simla 1972 semakin memperlemah efektivitasnya, sementara Pakistan tetap mendukung keberlanjutannya sebagai mekanisme pemantauan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, UNMOGIP lebih

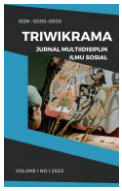

berperan sebagai pencatat insiden daripada sebagai aktor resolusi konflik. Meskipun keberadaannya menjadi pengingat akan keterlibatan komunitas internasional dalam konflik Kashmir, pengaruhnya dalam meredakan ketegangan terus menurun. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi dalam mekanisme pemantauan PBB agar lebih adaptif terhadap dinamika konflik modern. Pendekatan yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kehadiran internasional dapat memberikan dampak nyata dalam upaya menjaga perdamaian di Kashmir.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M. S., ali Guler, M., & Hasan, M. (2016). Kashmir conflict between India and Pakistan: A realist perspective. Journal of Asian and African Social Science and Humanities, 2(1), 13-23

APP News. (2023). India's Curbs Undermining UNMOGIP's Peacekeeping Operations in Kashmir. Retrieved from https://www.app.com.pk/global/indias-curbs-undermining-unmogips-peacekeeping-operations-in-kashmir-un-report/

Better World Campaign. (2023). Kashmir | UNMOGIP. Retrieved from https://betterworldcampaign.org/mission/kashmir-unmogip

Bose, S. (2003). Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace. Harvard University Press.

Drishti IAS. (2022). UN Military Observer Group in India and Pakistan. retrieved from https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/un-military-observer-group-in-india-and-pakistan.

Dixit, J. N. (2003). India-Pakistan in war and peace. Routledge.

Indian Express. (2016). UN to No Longer Monitor Situation in Kashmir Through Its Military Observer Group. Retrieved from https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/un-to-no-longer-monitor-situation-in-kashmir-through-its-military-observer-group-in-india-pakistan-says-limited-to-loc-2951211/

Khairunnisa, B. W. (2021). Resolusi Konflik Pakistan Dan India Dalam Perebutan Wilayah Kashmir Dan Peluang Mediator Bagi Indonesia. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 3, 12.

Monica, O., Ayunda, K., Aria, D., & Pd, M. (2017). Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970). Yogyakarta State Faculty of Science Historical Education, 4(6), 911-925.

Nugroho, A. Y. (2017). Aspek konstruktivis dalam sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Global Insight Journal, 1(2).Nugroho, A. Y. (2017). Aspek konstruktivis dalam sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Global Insight Journal, 1(2).

Payapo, V. (2014). Peran PBB dan SAARC dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Universitas Paramadina.

Rizky, A., & Pahlawan, I. (2016). Pengaruh perebutan wilayah Kashmir terhadap hubungan diplomatik India-Pakistan periode 2011-2013 (Doctoral dissertation, Riau University).

Schofield, V. (2003). Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War. I.B. Tauris.

United Nations Peacekeeping. (2016). Mandate of UNMOGIP. retrieved from https://unmogip.unmissions.org/mandate

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 7 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

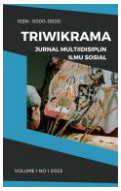

United Nations Peacekeeping. (2016). United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP). Retrieved from https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmogip